

KESANTUNAN PADA PRO-KONTRA PEMAKNAAN TUTURAN “SEMUA ORANG ADALAH LONTE” DI MEDIA SOSIAL TWITTER: SEBUAH TINJAUAN SEMANTIK DAN PRAGMATIK SIBER

Salamah, Eti Setiawati, Lilik Wahyuni

Universitas Brawijaya^{1,2,3}

salmasalamah11@gmail.com¹; ety64@ub.ac.id²; lilikwahyuni@ub.ac.id³

ABSTRAK

Bahasa sebagai media komunikasi yang dinamis dapat mengundang perdebatan dalam memaknai kata, tidak terkecuali media sosial Twitter yang menghadapi pro-kontra dalam memaknai tuturan “Semua orang adalah lonte, cuma yang dijual beda”. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena perdebatan pemaknaan tuturan tersebut berdasarkan sudut pandang linguistik atau bahasa itu sendiri dengan menganalisis bagaimanakah pro-kontra yang dimunculkan apabila ditinjau melalui tataran semantik, pragmatik siber, dan maksim kesantunan. Berjenis kualitatif deskriptif digunakan metode analisis agih dan teknik pengumpulan data simak-catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara semantik tuturan yang menyamaratakan semua orang dengan lonte tidak dapat dibenarkan. Berlandaskan jenis-jenis makna dalam kajian semantik, baik makna secara asli (denotatif, leksikal, dan referen) maupun makna tidak langsung (konotatif dan asosiatif), kata “lonte” berkaitan dengan hal-hal negatif, seperti pelacur, buruk laku, tunasusila, dsb. Adapun berdasarkan relasi makna dalam semantik, kata lonte bersinonim, berhiponim (subordinat), berhipernim (superordinat), berrelasi asosiatif, afektif, maupun etimologis dengan nilai dan rasa negatif serta tidak nyaman dalam makna katanya. Adapun dalam pragmatik siber, meski terdapat konteks “sama-sama menjual badan” tetapi terdapat konteks-konteks lain yang perlu dipertimbangkan, konteks psikologis, pemahaman bersama, sosial, dan budaya. Pada aspek-aspek pragmatik yang lain kata “lonte” juga memberi pengaruh serta memiliki penanda dan makna tersirat konvensional yang nilainya kurang baik. Polemik yang terjadi juga terbukti melanggar maksim kesantunan Lakoff, Brown dan Levinson, Leech, serta Asim Gunarwan. Selain itu, Indonesia adalah negara yang secara kemasyarakatan, kebahasaan, maupun kenegaraan atau hukum, tidak menerima lonte sebagai sebuah profesi. Satuan lingual lonte juga dianggap sebagai yang paling kasar di antara satuan lingual lain yang merujuk pada wanita tunasusila. Terdapat alternatif lain untuk menganalogikan profesi menjual dengan lebih santun dan relevan, misalnya pedagang, penjual, ataupun saudagar.

Kata kunci: pertentangan makna; lonte; Twitter; Semantik; Pragmatik Siber

PENDAHULUAN

Baru-baru ini jagat sosial media Twitter dihebohkan dengan adanya *trending* topik yang memperdebatkan pemaknaan suatu tuturan yang dinilai kontroversial dan menyinggung batasan moral, yakni pernyataan bahwa “semua orang adalah lonte, cuma yang dijual beda”. Adanya penyamarataan kedudukan semua orang dengan kata “lonte” yang diasosiasikan dengan penaja seks komersial (PSK) mengundang perdebatan atau polemik yang diterima oleh sebagian dan ditolak secara keras oleh sebagian yang lain sehingga memunculkan adanya pro-kontra pada pemaknaan tuturan “semua orang adalah lonte”. Di sinilah peran kajian linguistik dibutuhkan dalam menguraikan permasalahan kebahasaan berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri, dengan kata lain implementasi atau penerapan linguistik teoretis ke dalam permasalahan di lapangan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, sejatinya bahasa merupakan perantara komunikasi yang sangat dinamis sehingga munculnya beragam fenomena bahasa sangat mungkin untuk terjadi.

Zaman yang terus berkembang memberi dampak pada perkembangan, perubahan, hingga pergeseran makna kata dalam suatu bahasa (Rahma et al., 2018). Bahasa dalam lingkungan sosial yang dinamis dapat memproduksi kata baru ataupun menggeser makna dari suatu kata yang sudah ada. Pergeseran makna dapat didefinisikan sebagai pergeseran atau perubahan suatu makna kata menjadi meluas, menyempit, membaik, hingga memburuk maknanya (Wiyanti, Atmapratiwi, & Pangesti, 2022). Adapun generasi masa kini yang banyak terpapar kemajuan teknologi kerap mengonsumsi bahasa yang sifatnya amelioratif dan peyoratif untuk mendapat pengakuan khalayak dan dianggap mengikuti trend meski tidak mengetahui pasti makna kata yang dituturkan (Maulida, 2022). Maka, tidak mengherankan apabila gradasi dan degradasi makna terus bermunculan menyesuaikan masa dan massanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ningtyas, Difanti, & Ginanjar (2022) mengemukakan bahwa suatu bahasa terus berkembang menyesuaikan cara berpikir dan sikap para penuturnya, sehingga bahasa sebagai produk masyarakat juga akan terpengaruh arus teknologi komunikasi yang semakin cepat. Adapun komunikasi yang dimediasi Internet melibatkan pertukaran pesan besar-besaran hingga ke tahap multimodal, dan kebanyakan mengandung konotasi lisan. Itulah mengapa teks-teks tuturan yang disampaikan di satu sisi sering kali tampak sebagai campuran antara stabilitas dan kekakuan tertulis dan di sisi lain mengandung campuran unsur spontanitas dan kualitas bicara yang fana (Yus, 2011). Kembali pada permasalahan pemaknaan tuturan “semua orang adalah lonte” yang menjadi polemik di media sosial Twitter, kajian linguistik yang cocok diterapkan adalah gabungan antara studi semantik dan pragmatik yang keduanya berhubungan dengan pemaknaan kata. Leech (1983) mengenai hubungan antara semantik dan pragmatik, mengkategorikannya sebagai komplementer atau saling melengkapi, apa yang tidak bisa diselesaikan secara semantik akan dilengkapi secara pragmatik.

Wijana dan Rohmadi (2010) mengemukakan bahwa semantik dan pragmatik merupakan tataran linguistik yang menelaah makna-makna satuan lingual, di mana semantik mengkaji makna secara internal dan bebas konteks, sedangkan pragmatik secara eksternal dan terikat konteks. Pragmatik menurut Levinson (1983) merupakan kajian antara bahasa dan konteks yang terkodifikasi dalam suatu bahasa, sedangkan Yule (1996) mendefinisikan pragmatik sebagai sebuah kajian makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh petutur. Adapun perkembangan pragmatik yang masih baru dan berkaitan erat dengan teknologi atau dunia siber disebut sebagai *cyberpragmatics* (Rahardi, 2020). Dalam konteks siber, batasan aspek konteks tuturan menjadi sangat cair bahkan kabur (Rahardi, 2019) sehingga diperlukan telaah yang intensif dalam membedah fenomena yang terjadi.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang dapat menjadi landasan dalam penelitian ini, di antaranya penelitian oleh Rahardi (2019) yang mendeskripsikan peran konteks pragmatik dalam perspektif pragmatik siber. Pada tahun-tahun berikutnya, Rahardi (2020, 2022) kembali membahas mengenai pragmatik siber berdasarkan konteks eksternal virtual dan konteks situasi. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan semantik atau pemaknaan kata telah dilakukan oleh Rahma et al (2018) yang mengkaji mengenai pergeseran makna dengan melakukan analisis peyorasi dan ameliorasi dalam konteks kalimat. Selain itu terdapat juga penelitian terbaru atau mutakhir yang dilakukan oleh Ningtyas, Difanti, dan Ginanjar (2022) yang membahas pergeseran makna pada istilah penunjuk fauna di media sosial Twitter berdasarkan perspektif kajian semantik, juga penelitian oleh Wiyanti, Atmapratiwi, dan Pangesti (2020) yang pergeseran makna kosakata bahasa Indonesia pada pengguna Twitter.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang relevan tersebut ditemukan adanya *research gap* atau celah yakni masih belum terdapat kajian yang menyandingkan semantik dan pragmatik siber sekaligus dalam meninjau suatu permasalahan bahasa, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut. Secara rinci penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimanakah pro-kontra yang dimunculkan pada tuturan “semua orang adalah lonte” berdasarkan sudut pandang linguistik atau bahasa itu sendiri, yakni pembedahan melalui tataran semantik, pragmatik siber, dan kemudian mengaitkannya dengan maksim atau prinsip kesantunan. Wacana penyamarataan semua orang dengan lonte layak dikaji sebagai bentuk penguraian permasalahan dalam berbahasa berdasarkan perspektif linguistik atau bahasa itu sendiri. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperjelas kedudukan makna suatu kata sehingga dapat meminimalisir perdebatan yang memicu konflik dan mengandung unsur merendahkan orang lain.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi linguistik semantik dan pragmatik siber. Pemilihan jenis penelitian dilandaskan pada sifat penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman informasi sehingga dihasilkan pemaknaan yang lebih komprehensif (Asdar, 2018). Data dalam penelitian ini berupa transkripsi teks tuturan yang bersumber dari cuitan pengguna media sosial Twitter dengan rentang waktu kejadian berkisar selama setengah bulan sejak pertengahan hingga akhir bulan September 2022. Metode pengumpulan data menerapkan teknik simak-catat, dikarenakan data dikumpulkan dengan cara menyimak penggunaan bahasa yang dituturkan oleh subjek penelitian (Sudaryanto, 2015). Adapun teknik catat digunakan untuk mentranskripsi ke dalam bentuk yang relevan dengan penelitian berdasarkan penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2014). Studi literatur juga turut diikutsertakan sebagai bagian pelengkap analisis melalui serangkaian kegiatan perujukan sumber pustaka yang dapat memperkuat analisis penulis agar lebih relevan (Zed, 2018).

Selanjutnya, dalam menganalisis data diterapkan metode agih, yakni metode yang alat penentunya berasal dari bahasa itu sendiri atau bagian bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015). Namun, untuk memperkuat hasil analisis diterapkan juga model analisis isi, yakni menganalisis teks tuturan yang ada pada

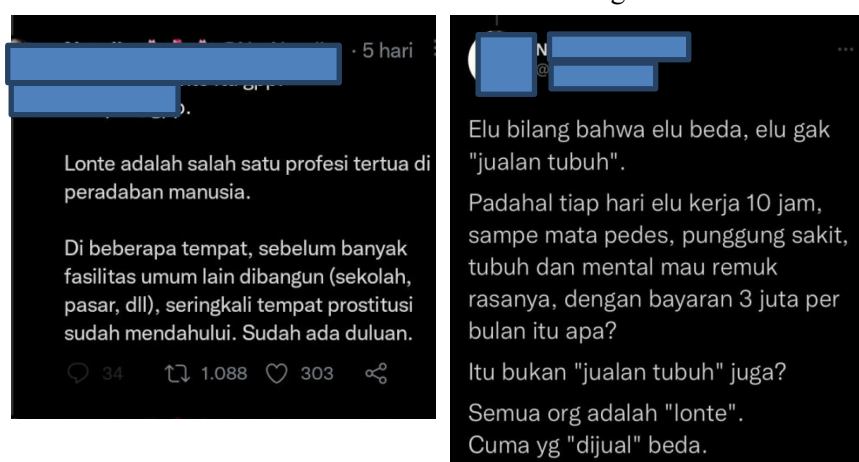
cuitan netizen Twitter. Model analisis isi terdiri dari tahap reduksi data yakni memilah data dengan mengklasifikasi ke dalam kategori data primer, sekunder, dan residu; lalu tahap pengolahan dan penyajian data yakni menganalisis data sesuai topik permasalahan yang diangkat; dan yang terakhir penarikan simpulan dengan cara menghimpun intisari hasil analisis yang dipaparkan (Miles & Huberman, 2014). Data-data yang terkumpul dibuktikan keabsahannya melalui dua dari tiga macam teknik triangulasi, yakni pengumpulan data dengan sumber-sumber yang berbeda (triangulasi sumber) dan pengumpulan data dalam rentang waktu yang berbeda (triangulasi waktu) (Mekarisce, 2020).

ANALISIS

Pro-Kontra pada Tuturan “Semua Orang adalah Lonte”

Polemik generalisasi semua orang atau semua profesi dengan lonte berawal dari cuitan salah satu akun di media sosial Twitter yang menyatakan bahwa tidak masalah menjadi lonte karena lonte adalah salah satu profesi tertua di dunia. Cuitan kontroversial tersebut juga dibarengi dengan cuitan lain yang menyatakan bahwa semua profesi pada dasarnya sama dengan lonte karena sama-sama “menjual tubuh” untuk bekerja atau mendapatkan uang. Secara eksplisit, dinyatakan bahwa “semua orang adalah lonte, hanya saja yang dijual berbeda”. Cuitan inilah yang kemudian menimbulkan polemik panjang di media sosial Twitter.

Gambar 1. Awal Mula Kontroversi “Semua Orang Adalah Lonte”



Sengitnya perdebatan yang terjadi sampai mengantarkan isu “semua orang adalah lonte” ke dalam jajaran *trending topic* Twitter dengan setidaknya terdapat lebih dari delapan belas ribu *engagement* yang mengakses isu tersebut. Berbagai jenis netizen dengan profesi yang bervariasi mulai dari *influencer*, dokter, hingga doktor, turut hadir dan saling melempar argumen yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi kubu yang cenderung pro dalam artian tidak mempersalahkan tuturan tersebut dan kubu kontra yang menentang adanya tuturan tersebut. Beragam alasan dilemparkan baik untuk mempertahankan maupun mempertentangkan, dan berbagai sudut pandang pun turut dihadirkan dalam membedah tuturan “semua orang adalah lonte”. Adapun di antara banyaknya argumen, alasan, ataupun sudut pandang yang disampaikan, perspektif linguistik atau bahasa adalah yang paling diperdebatkan kebenarannya menimbang bahwa perdebatan dan pergeseran makna kata memang menjadi bagian dari ranah kajian kebahasaan.

Baik dari kubu pro ataupun kontra masing-masing memiliki pembelaan diri yang disandarkan pada linguistik teoretis. Meskipun terdapat juga pihak yang merasa bahwa diskursus perlontean dalam argumentasi nisbi, subjektifitas opini, lampinan diksi, sosiolinguistik, sampai dengan semantik bertanda petik tidak lebih dari sekadar kultur manusia yang berakhir buntu pada pergosipan dan perdebatan pelik, dan apabila hendak mengupas hal tersebut maka perlu campung tangan ranah akademis karena media sosial tidak memiliki batasan pasti dalam mengontrol berbagai tanggapan yang muncul. Adanya gradasi argumentasi yang sangat kontras menjadikan dua subbagian kajian kebahasaan, semantik dan pragmatik, seolah adalah kajian yang saling bertentangan, padahal seharusnya bersifat komplementer atau saling melengkapi.

Pembelaan pihak pro cenderung membawa-bawa majas alegori dan unsur konteks di dalam argumentasinya, dengan kata lain bergantung pada tataran pragmatik di mana mereka memaknai tuturan tersebut dan menganggapnya benar karena mereka percaya dengan adanya konteks ‘sama-sama menjual badan’. Pihak pro berdalih bahwa profesi yang umumnya mengharuskan bekerja selama sepuluh jam (cth. pegawai kantoran), mata pedas (karena menatap layar komputer terlalu lama), punggung sakit (karena

duduk dalam waktu yang tidak sebentar), dengan bayaran sekitar tiga juta rupiah perbulan (kisaran gaji di Indonesia) berarti sama saja dengan profesi lonte atau pelacur yang memperkerjakan tubuhnya untuk mendapatkan uang. Selain itu, terdapat pernyataan bahwa semua orang adalah pelacur dengan caranya masing-masing, ini hanya masalah apa yang dipertukarkan, ditambah juga dengan pernyataan bahwa tuturan “semua orang adalah lonte” memiliki konotasi yang sama dengan frasa “budak korporat” dimana budak tidak bermakna seseorang yang dirantai dan dikurung sehingga permasalahan yang diperdebatkan hanyalah masalah semantik dalam konteks jualan, bukan sesuatu yang perlu ditentang.

Tidak hanya itu, ada juga pihak pro yang mempertanyakan apakah profesi lonte sebegitu hinanya sehingga orang yang merasa dirinya normal tidak mau disetarakan, padahal selama bukan sebagai pemilik modal maka seseorang adalah “lonte industri” sehingga masyarakat kelas menengah harus sadar diri dan tidak bersikap denial atau menentang. Bahkan ada juga yang bersikap defensif dengan menyatakan bahwa di mata Tuhan semuanya sama, dan lonte hanya melacurkan badannya, sedangkan orang yang merasa mulia sering tanpa sadar melacurkan jiwanya. Senada dengan hal tersebut, terdapat juga pihak pro yang berpendapat bahwa lonte merupakan profesi yang tidak semudah perkiraan orang lain, dan pihak yang merasa kontra karena lonte adalah pekerjaan tidak halal seharusnya tidak berpikir demikian karena pekerjaan lain pun memiliki potensi penyelewengan dan pengrusakan di dalamnya, berbeda dengan profesi lonte yang kesepakatan kerjanya dianggap lebih jelas. Terdapat juga pihak pro yang memberi pernyataan bahwa pada akhirnya semua orang melacurkan dirinya demi uang karena sejatinya manusia ialah budak uang.

Lalu, ada juga pihak yang mengatakan bahwa apabila dipandang dari segi bahasa justru hal tersebut bukanlah masalah karena bahasa tidak selalu tentang makna harfiah. Bahkan terdapat juga argumen yang menentang keras adanya definisi kamus, baik KBBI, Oxford Dictionary atau semacamnya dalam perdebatan yang tengah berlangsung saat itu karena pihak tersebut merasa bahwa definisi baku bukan satu-satunya cara dalam berkomunikasi sehingga orang-orang yang membawa-bawa makna kamus dianggap sebagai orang dengan pemikiran pseudo-logic atau kebenaran semu, dan juga pembawaan definisi baku ke diskursus informal dianggap sebagai hal yang aneh oleh pihak pro. Lebih dari itu, pihak tersebut bahkan menolak adanya relasi kuasa antara “buruh” dan “lonte”, serta kebakuan dalam konsep majas dan analogi yang mempertentangkan penyamarataan semua orang atau profesi dengan lonte. Namun, ada juga pihak pro yang merasa bahwa tuturan tersebut sedari awal memiliki konteks majas alegori, yakni majas yang menyatakan kiasan atau ungkapan, tetapi pihak pro merasa pihak kontra menanggapi dengan terlalu literal dan terlalu jauh.

Selain itu, beberapa argumen lain dari pihak pro kebanyakan menyeret unsur konteks di dalam argumennya. Misalnya salah satu pihak dari kubu pro yang merasa bahwa keributan yang terjadi merupakan bentuk kecacatan masyarakat dalam memahami konteks. Ada juga yang mengutarakan bahwa seharusnya orang-orang tidak marah dengan tuturan “semua orang adalah lonte” karena terdapat konteks di dalamnya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa apabila ada yang marah karena diteriaki dasar lonte maka tinggal menjelaskan bahwa orang tersebut tidak mengerti konteks, dan konteksnya adalah semua orang lonte karena semua orang “menjual badannya”. Pihak pro juga beranggapan bahwa bahasa merupakan produk dari budaya sehingga tidak ada yang statis, semua mengikuti konteks baik waktu, wacana, dan sistem. Namun, terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa tidak masalah apabila seseorang marah karena merasa terhina diteriaki “dasar lonte”, tetapi dalam wacana semua orang pada dasarnya pelacur seharusnya tidak marah karena terdapat konteks di dalamnya yang harus dipahami, karena jika tidak pasti akan sulit untuk menerima wacana tersebut.

Selain itu, terdapat argumen bahwa orang cerdas seharusnya mampu memahami konteks dalam wacana sehingga mampu menghubungkan titik-titik data dan mengambil keputusan yang logis serta etis, tidak hanya berpegang pada moral bentukan semu belaka. Lalu, ada juga yang secara tersirat menyatakan bahwa pihak kontra yang merasa resah dan tersinggung dikarenakan ketidakpahaman terhadap konteks, karena apabila paham konteks seharusnya tidak mudah tersinggung dan hidup lebih damai. Pihak pro juga merasa bahwa tuturan semua orang adalah pelacur tidak selalu bermakna pelacur dalam konteks jualan seks, bisa juga pelacur dengan menjual jasa ataupun skill, tetapi di sisi lain tidak masalah juga apabila disamaratakan dengan “lonte” yang juga menjual jasa dengan memuaskan pelanggan melalui seks, karena sama-sama “menjual jasa”.

Adapun pembelaan pihak kontra cenderung membawa makna kamus atau makna leksikal dalam argumentasinya, beragam definisi dari berbagai jenis kamus dihadirkan sehingga argumentasi cenderung bergantung pada tataran semantik yang memaknai kata secara internal berdasarkan medan leksikal kata itu sendiri. Kebanyakan dari kubu kontra merasa bahwa tuturan atau wacana “kita semua lonte karena kita semua jualan badan” tidak sebanding dengan sulitnya mengembangkan diri melalui pendidikan, melatih

keterampilan, mengembangkan CV, hingga memperbanyak pengalaman sehingga penyamarataan semua orang dengan lonte terasa merendahkan usaha-usaha profesi lain dalam mengembangkan diri menjadi lebih baik. Selain itu, pihak kontra juga merasa apabila ada orang yang merasa nyaman dipanggil lonte tidak masalah, tetapi jangan sampai menggeneralisir semua orang demikian. Lalu, ada juga pihak kontra yang merasa bahwa masalah ini bukanlah masalah hina atau tidak, tetapi secara sederhana tuturan tersebut memang tidak dapat dibenarkan karena menurut definisi, pelacur menjual layanan seksual sedangkan tidak semua orang terlibat secara emosional dalam wacana tersebut sehingga adanya reduksionisme mana dianggap mengganggu.

Makna-makna kamus yang dibawa dalam perdebatan ini di antaranya makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V yang mendefinisikan lonte sebagai perempuan jalang, wanita tunasusila, pelacur dan sebagainya. Morfem pelacur yang berarti orang yang melacur atau melakukan hal “lacur” juga memiliki definisinya sendiri, yakni lacur secara leksikal didefinisikan sebagai malang, celaka, sial, dan buruk laku. Lalu, dalam Miriam Webster Dictionary, kata “lonte” yang bersinonim dengan “whore” dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai seseorang yang dibayar untuk melakukan hubungan atau aktivitas seksual. Selain whore, kata lonte juga memiliki korelasi dengan kata prostitusi atau prostitute yang menurut penerjemahan Google didefinisikan sebagai kata benda atau kata kerja yang merujuk pada seseorang yang berkaitan dengan aktivitas seksual dan dibayar untuk itu. Senada dengan hal tersebut, dalam KBBI V prostitusi didefinisikan sebagai pelacuran, pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Kesemua definisi kamus tersebut mengarahkan kata lonte, lacur, dan prostitusi ke dalam makna leksikal yang memiliki medan makna negatif, baik secara harfiah maupun secara budaya.

Penyamarataan semua orang dengan lonte oleh pihak kontra dianggap menentang usaha kesetaraan gender yang selama ini diperjuangkan. Seyogyanya seorang manusia, khususnya perempuannya memiliki niatan untuk menjadi terdidik, bahkan jika tidak memiliki biaya dapat berusaha mencarinya beasiswa, bukan menerima pemikiran bahwa lonte adalah profesi yang normal. Lalu, merespons pendapat pihak pro yang menolak makna harfiah, pihak kontra menyanggah dengan menyatakan bahwa makna bahasa memang tidak selalu harfiah tetapi prostitusi tidak memiliki makna semantik (positif) karena konteksnya pasti pelacuran atau transaksi seksual, sedangkan kata “budak” baru dapat disetarakan dengan “orang gajian”. Senada dengan hal tersebut, terdapat juga pihak kontra yang menanggapi bahwa istilah budak korporat mengacu pada kondisi dalam tekanan atau kendali atasan, sedangkan semantik dari aktivitas pekerja seks masih dipertanyakan eksistensinya. Selain itu pihak kontra merasa bahwa apabila memang lonte adalah pekerjaan yang setara maka seharusnya profesi tersebut diakui negara dan harus ikut membayar pajak sesuai peraturan.

Selanjutnya, kubu kontra juga mempertanyakan mengapa pihak pro membuat definisi sendiri di saat ada definisi baku dari prostitusi yang mengacu pada cara mencari uang melalui aktivitas seksual. Pihak tersebut menganggap bahwa pekerja sektor lain tidak melibatkan aktivitas seksual sebagaimana definisi baku prostitusi sehingga tidak bisa disamakan. Penolakan kehadiran makna leksikal dan hanya bergantung pada unsur konteks juga dianggap sebagai hal yang tidak tepat karena orang yang berpendidikan ketika beropini seharusnya memulai dari definisi baku atau makna leksikal terlebih dahulu. Kemudian, menanggapi argumen pihak pro yang cenderung membawa unsur konteks, pihak kontra merasa hal tersebut mengada-ada karena seharusnya konteks pelacur mengacu pada jual diri yang mengarah pada zina, sedangkan pekerja dalam profesi lain mengacu pada jual diri yang mengarah pada kemampuan menyelesaikan suatu masalah melalui ilmu. Pernyataan tersebut diperkuat dengan argumen bahwa memang benar ada kesamaan konteks “jualan” tetapi tiap “jualan” memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada pendidik yang menjual ilmu untuk mencerdaskan orang lain, dan tentu tidak nyaman apabila orang tersebut dipanggil pelacur akademik.

Selain itu, terdapat juga pihak kontra yang merasa penyamarataan penjual dan lonte melawan kaidah pemosisian subjek dan objek, dimana simpulan “penjual + lonte” merupakan subjek + subjek, sedangkan apabila hendak subjek + objek maka yang benar adalah “penjual + jualan”. Misalnya pada profesi guru berarti “penjual + ilmu”, sedangkan pada profesi lonte maka “penjual + seksual”, dua hal yang tidak bisa disamaratakan. Bahkan apabila dilihat dari sudut pandang budaya masyarakat maka dalam budaya Indonesia kata lonte, pelacur, dan PSK tentu diasosiasikan dengan menjual tubuh dengan tujuan kepuasan seks, bukan sekadar menjual jasa atau menjual badan tanpa embel-embel aktivitas seksual di baliknya.

Namun, ada juga pihak kontra yang merasa bahwa apapun konteksnya konotasi kata lonte tetaplah negatif. Baik lonte, pelacur, maupun prostitusi sama-sama merupakan kata negatif sehingga ketika dimunculkan wacana “semua orang pada dasarnya pelacur/lonte” akan memicu pertanyaan apakah seseorang yang memilih menikah akan disamaratakan dengan orang yang menjual badan kepada pria untuk

melakukan hal seksual. Kubu kontra beranggapan bahwa apabila menyatakan semua orang adalah lonte karena semuanya menyewakan badan sama seperti menyatakan bahwa semua orang adalah pembunuh karena setiap kali mandi atau masak, ada makhluk hidup yang mati (cth. hewan, tumbuhan, kuman). Selain itu, ada juga pendapat lain yang mengaitkan permasalahan generalisasi lonte dengan kondisi di kehidupan sehari-hari, misalnya saat seorang anak ditanya cita-citanya lalu dijawab dengan pada dasarnya semua profesi pelacur maka tentu saja hal tersebut tidak akan nyaman di telinga.

Kemudian, menanggapi terkait majas alegori yang dijadikan alasan oleh pihak pro dalam membenarkan wacana tersebut, pihak kontra merasa perbandingannya kurang tepat karena tidak ada bagian yang dapat benar-benar dibandingkan secara linear, misalnya apakah seorang guru dan pelacur dapat disamakan hanya karena sama-sama “menjual jasa”, pihak tersebut juga mempertanyakan mengapa alegori yang dibawa dilandasi oleh konteks yang sama yakni pekerjaan di saat majas alegori umumnya mengacu pada penyamaan suatu hal dengan hal lain yang berbeda jenisnya, misalnya kitab suci disamakan dengan rambu lalu lintas karena sama-sama harus dipatuhi sebagai penunjuk jalan, atau kelas disamakan dengan kondisi pasar seandainya setiap hari terdapat keributan di dalamnya, sedangkan penyamarataan lonte dengan semua profesi dirasa tidak memenuhi aturan pengibaratan yang umumnya digunakan.

Adapun beberapa pihak dalam kubu kontra secara terang-terangan menunjukkan ketidaknyamanannya karena merasa masih terdapat pilihan kata lain yang lebih nyaman bagi semua pihak, sehingga pihak tersebut mencoba memberikan saran dengan alih-alih menggunakan kata lonte yang konotasinya tidak bagus dan berpotensi menjadi penghinaan, maka lebih baik apabila menggunakan kalimat “pada dasarnya semua orang adalah pedagang, hanya saja berbeda jualannya”. Kata pedagang dan penjual, tidak memuat medan leksikal negatif baik secara harfiah maupun budaya. Wacana setiap orang pelacur pada dasarnya adalah *prejudice* atau prasangka yang meremehkan serta terlalu membabi buta, karena tentu ada orang yang meski berada pada kondisi sulit tetap bertahan untuk tidak melacurkan dirinya karena berpegang pada kompas moral dan norma susila yang ada.

Tuturan “Semua Orang adalah Lonte” dalam Tinjauan Semantik

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan bagian pertama, dapat diketahui bahwa kubu pro cenderung menolak adanya makna leksikal atau definisi baku yang berasal dari berbagai macam jenis kamus karena menganggap kehadiran konteks dalam berkomunikasi lebih penting dari sekadar makna harfiah. Adapun pihak kontra meyakini bahwa dalam memaknai kata harus berangkat dari definisi baku terlebih dahulu. Pihak kontra juga merasa bahwa kata “lonte” memiliki konotasi dan referen yang mengacu pada hal-hal negatif sehingga tidak layak untuk dipukul rata atau digeneralisasikan dengan semua profesi yang ada. Namun, baik pihak pro maupun pihak kontra, keduanya membawa-bawa kata “semantik” ke dalam argumentasinya. Pihak pro merasa perdebatan yang terjadi hanyalah persoalan semantik dalam konteks jualan sedangkan pihak kontra merasa prostitusi tidak punya makna semantik yang lain karena konteksnya sudah pasti pelacuran.

Apabila ditinjau berdasarkan perspektif semantik maka terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Pertama-tama, semantik merupakan kajian yang mengkaji mana secara internal berdasarkan konteks, bukan konteks. Semantik memperlakukan makna sebagai hubungan dua segi (*dyadic*), yakni “apa maksud dari X” bukan “apa yang kamu maksud dengan X” (Leech, 1983). Maka dari itu, dalam perspektif kajian semantik, pemaknaan kata berfokus pada makna internal kata itu sendiri tanpa campur tangan hubungan situasi dan budaya di dalamnya. Tarigan (2015) mendefinisikan semantik sebagai telaah makna yang menelaah lambang atau tanda yang menyatakan makna. Sejalan dengan Tarigan, Pateda (2010) mendefinisikan bahwa semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna, dan Simarmata (2016) mendefinisikan semantik sebagai bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara petanda dan hal yang ditandainya. Petanda “lonte” secara umum merujuk atau menandai wanita tunasusila yang melakukan pekerjaan dengan melibatkan aktivitas seksual di dalamnya.

Adapun secara komprehensif, dalam semantik dapat dibedakan menjadi tujuh jenis makna. Pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Dalam polemik generalisasi semua orang adalah lonte yang paling dipermasalahkan adalah leksem “lonte” yang oleh pihak kontra dianggap kata yang negatif. Makna leksikal merupakan makna yang sesuai dengan referennya, hasil observasi alat indera, atau makna yang nyata dalam kehidupan (Chaer & Muliastuti, 2014). Berdasarkan definisi makna leksikal tersebut, maka leksem lonte apabila dicocokkan dengan referen, observasi alat indera, dan makna nyata dalam kehidupan, semuanya mengarah pada profesi yang berhubungan dengan pelacuran atau aktivitas seksual, seorang wanita jalang atau wanita tunasusila, bahkan dijadikan sebagai kata umpatan yang ditujukan untuk menghina atau merendahkan martabat seseorang. Secara semantik leksikal, tidak ada medan positif yang dapat diambil dari leksem “lonte”. Adapun secara gramatikal, tuturan “semua orang adalah lonte” bermakna

penyetaraan semua orang dengan lonte, yang mana berarti penyamarataan semua profesi dengan pekerjaan pelacur atau aktivitas seksual, jalang, dan tunasusila. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan semantik pada jenis makna yang pertama, wacana semua orang adalah lonte tidak dapat dibenarkan.

Kedua, makna referensial dan/atau nonreferensial. Perbedaan makna referensial dan makna nonreferensial didasarkan pada ada tidak adanya referen dari kata tersebut. Kata “lonte” termasuk kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis profesi yang berhubungan dengan pelacuran atau aktivitas seksual. Ketiga, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif menyangkut informasifaktual objektif yakni makna yang sebenar-benarnya bukan kias. Pada kata “lonte” makna denotatifnya adalah profesi yang berhubungan dengan pelacuran ataupun prostitusi. Adapun makna konotatif adalah makna yang muncul apabila suatu kata mempunyai “nilai rasa”, baik positif maupun negatif. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kata lonte tidak sekalipun pernah dianggap sebagai kata dengan rasa yang positif karena selalu dikaitkan dengan wanita penghibur, jalang, dan tunasusila. Maka, makna konotatif yang terkandung dalam kata “lonte” adalah konotasi negatif.

Keempat, makna kata dan makna istilah. Perbedaan antara makna kata dan makna istilah berkenaan dengan tepat atau tidaknya makna sebuah satuan ujaran. Makna kata sifatnya umum sedangkan makna istilah memiliki makna yang sudah pasti dan tetap. Kepastian dan ketepatan makna istilah hanya dapat dimunculkan ketika istilah tersebut digunakan pada bidang keilmuan tertentu (Chaer & Muliastuti, 2014). Kata “lonte” tidak memiliki makna istilah karena tidak digunakan oleh suatu keilmuan tertentu sehingga yang dimunculkan adalah makna kata, dan secara umum kata lonte dimaknai setara dengan pelacur atau penaja seks komersial (PSK).

Kelima, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apa pun dengan kata lain makna sesungguhnya sebagaimana halnya makna leksikal, denotatif, dan referensial. Kata “lonte” secara konseptual bermakna perempuan jalang, perempuan nakal, wanita tunasusila, pelacur, sundal, jobong, cabo, munci, dan sebagainya. Adapun makna asosiatif berkenaan dengan makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata yang merujuk pada hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya warna merah yang diasosiasikan dengan makna berani dan warna putih atau bunga melati yang diasosiasikan dengan makna suci. Pada kata “lonte” makna asosiatif yang dapat diasosiasikan adalah buruk laku.

Keenam, makna idiomatikal dan peribahasa. Makna jenis keenam umumnya berkaitan dengan perumpamaan atau pengandaian. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan makna idiomatikal dan makna peribahasa dalam kata “lonte”. Ketujuh, makna kias, yakni bentuk bahasa yang tidak merujuk pada arti sebenarnya. Pada kata “lonte” terdapat satu makna kias yang sering digunakan yakni frasa “kupu-kupu malam” yang umumnya merujuk pada profesi yang bersinonim dengan lonte, mulai dari wanita penghibur, wanita tunasusila, perempuan jalang, dan sebagainya.

Berdasarkan tujuh jenis makna yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kata lonte, pelacur, maupun prostitusi tidak memiliki nilai positif. Baik makna secara asli (denotatif, leksikal, dan referen) maupun makna tidak langsung (konotatif dan asosiatif), kata “lonte” berkaitan dengan hal-hal yang negatif, seperti pelacur, buruk laku, tunasusila, jalang, sundal, dan sebagainya. Maka dari itu, adanya tuturan ataupun wacana yang menggeneralisasi semua orang atau semua profesi dengan kata lonte tidak dapat dibenarkan secara semantik karena terdapat unsur merendahkan di dalamnya.

Selanjutnya, dalam studi kajian Semantik dikenal juga relasi makna yang terdiri dari sebelas macam relasi. Pertama, relasi sinonim atau persamaan, kata atau leksem “lonte” bersinonim dengan pelacur, tunasusila, sundal, jalan, dan leksem-leksem lain yang merepresentasikan “perempuan nakal”. Membahas terkait sinonim, tidak dapat dilepaskan dengan kehadiran tesaurus. Dalam tesaurus bahasa Indonesia, kata “lonte” memiliki medan leksikal wanita, jahat, kecurangan, pelacuran, perek, perempuan geladak, perempuan jahat, perempuan jalan, perempuan jalang, perempuan jangkak, perempuan lacur, perempuan lecah, perempuan nakal, perempuan simpanan, sundal, wanita tunasusila, wanita nakal, perempuan binal, ayam kampus, kupu-kupu malam, tante girang, geromo, dan sebagainya. Relasi kedua, antonim atau lawan kata. Pada kata “lonte” secara khusus tidak ditemukan kata yang menjadi antonim dari kata lonte itu sendiri. Namun secara umum, kata lonte yang berkaitan dengan wanita penghibur dan penaja seks komersial dapat diantonimkan dengan perempuan pekerja yang tidak melibatkan aktivitas seksual di dalamnya.

Relasi ketiga homonimi (sama penulisan sama pengucapan beda makna), homofoni (beda tulisan sama pengucapan beda makna), dan homografi (sama tulisan beda pengucapan beda makna). Adapun kata lonte tidak memiliki homonimi, homofoni, maupun homografi dengan leksem lain dalam bahasa Indonesia. Namun terdapat masyarakat lokal di salah satu daerah di Indonesia yang menyamakan lonte secara homonimi dengan suatu hewan yang berbentuk seperti kembang. Relasi keempat hiponimi (subordinat) dan hipernimi (superordinat). Kata lonte merupakan subordinat atau hiponim dari wanita tunasusila, adapun

wanita tunasusila merupakan superordinat atau hipernim dari lonte, pelacur, perempuan jalang, sundal, jobong, dan sebagainya. Namun pada tuturan yang menyetarakan semua profesi adalah lonte maka pihak pro secara langsung tidak langsung menjadikan lonte sebagai superordinat dan profesi atau pekerjaan sebagai subordinat. Dalam logika berbahasa, konsep yang demikian itu tidak dapat dibenarkan atau dapat dinyatakan sebagai kesalahan melogika bahasa dalam menempatkan hierarki kata.

Relasi kelima polisemi, yakni satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Kata lonte tidak memiliki relasi polisemi karena maknanya hanya satu, yakni merujuk pada profesi yang berhubungan dengan aktivitas seksual, seperti pelacur, penjaja seks komersial (PSK), sundal, dan sebagainya. Relasi keenam, ambiguitas atau ketaksaan yakni kata dengan makna ganda. Sama halnya dengan relasi polisemi, kata lonte tidak memiliki makna ganda karena merujuk pada satu pemaknaan yang sama yakni pelacur, PSK, dan sebagainya. Pada relasi ketujuh, redudansi (penggunaan unsur segmental yang berlebihan) dan relasi kedelapan, meronimi (makna hierarki), tidak ditemukan adanya hubungan yang dapat dikaitkan dengan kata lonte. Relasi kesembilan, relasi makna asosiatif adalah hubungan yang secara tersirat muncul di benak seseorang saat mendengar suatu kata. Saat mendengar kata lonte, makna yang umumnya tersirat dalam benak seseorang adalah perempuan nakal atau pelacur yang menjual dirinya melalui hubungan seksual untuk mendapatkan uang.

Selanjutnya, relasi kesepuluh yakni relasi makna afektif yang berkaitan dengan perasaan seseorang ketika mendengar suatu kata tertentu, dapat berupa perasaan positif maupun perasaan negatif. Sebagaimana halnya beberapa pendapat pihak kontra, alasan mereka menolak adalah karena merasa kata lonte adalah kata yang tidak nyaman saat ditulis apalagi saat diucapkan, bahkan ada yang merasa marah apabila anggota keluarganya disetarakan dengan kata lonte. Dengan kata lain, kata lonte memiliki relasi makna afektif berupa perasaan negatif berupa rasa tidak nyaman dan rasa marah. Terakhir, relasi makna kesebelas yakni relasi makna etimologis. Berbeda dengan makna leksikal, makna etimologis mencerminkan perubahan yang terjadi dengan kata tertentu. Makna etimologis kata berhubungan dengan nilai, norma, keadaan sosial-politik, ekonomi, hingga budaya suatu masyarakat. Secara etimologi, kata lonte dimunculkan oleh masyarakat Jawa, *lonthe* (ꦭꦺꦺꦛ) yang artinya pelacur. Namun, di antara banyak leksem dalam bahasa Jawa yang digunakan untuk menyebut wanita tunasusila atau pelacur, kata lonte dianggap yang paling kasar dari semuanya.

Berdasarkan sebelas relasi makna yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kata lonte bersinonim, berhiponim, dan berhipernim dengan kata yang memiliki medan makna negatif. Secara relasi makna asosiatif, afektif, maupun etimologis kata lonte juga menimbulkan nilai dan rasa negatif serta tidak nyaman dalam makna katanya, bahkan secara etimologis kata lonte dianggap paling kasar dari semua kata lain yang merujuk pada kata pelacur. Jadi, dapat ditarik simpulan bahwa dalam tinjauan semantik wacana yang menggeneralisasi semua orang adalah lonte tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan nilai negatif, perasaan tidak nyaman, bahkan kesan kasar di dalam pemaknaannya sehingga tidak tepat untuk dijadikan sebagai sebuah analogi.

Tuturan “Semua Orang adalah Lonte” dalam Tinjauan Pragmatik Siber

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan bagian pertama, dapat diketahui bahwa kubu pro merasa argumennya benar karena memiliki konteks di dalamnya, yakni konteks “menjual badan” untuk bekerja atau menghasilkan uang. Pihak pro berdalih bahwa profesi yang umumnya mengharuskan bekerja selama berjam-jam hingga mata pedas dan punggung sakit untuk mendapatkan bayaran atau gaji berarti sama saja dengan profesi lonte atau pelacur yang memperkerjakan tubuhnya untuk mendapatkan uang. Adapun pihak kontra meyakini bahwa apapun konteksnya generalisasi kata lonte tidak dapat dibenarkan karena konteks lonte secara umum dihubungkan dengan pelacur yang mendapat uang melalui aktivitas seksual. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa memang benar ada kesamaan konteks “jualan” tetapi tiap “jualan” memiliki tujuan yang berbeda. Bagi pihak kontra, apabila setiap orang “menjual” mengapa tidak dikatakan bahwa pada dasarnya semua orang adalah pedagang atau penjual, hanya saja berbeda jualannya. Meski tidak secara eksplisit menyebut kajian pragmatik, tetapi penyeretan unsur “konteks” ke dalam perdebatan kubu pro dan kontra berarti secara tidak langsung telah melibatkan kajian pragmatik ke dalamnya.

Apabila ditinjau berdasarkan perspektif pragmatik siber maka terdapat beberapa hal yang perlu diuraikan terlebih dahulu. Pertama-tama, berbeda dengan semantik yang mengkaji makna secara internal berdasarkan konteks, pragmatik mengkaji makna secara eksternal berdasarkan konteks yang mengacu pada hubungan situasi dan budaya (Kreidler, 1998). Apa yang dimaksud dengan pragmatik siber adalah kajian pragmatik dalam ruang lingkup siber atau dunia internet. Rahardi (2022) mengemukakan bahwa konteks

dalam pragmatik siber sangat kompleks sehingga harus diberi perhatian lebih dalam memaknai tuturan. Dalam perkembangan pragmatik siber, sebuah tuturan dapat memiliki makna pragmatik yang beragam karena batasan yang sangat cair.

Yus (2011) sebagai salah satu pencetus pragmatik siber menyatakan bahwa tujuan kajian tersebut adalah menerapkan studi pragmatik dengan sasaran pengguna internet. Komunikasi yang dimediasi internet umumnya melibatkan pertukaran pesan besar-besaran dengan cara tertulis. Teks yang diketik kebanyakan bersifat hibrida antara stabilitas dan kekakuan teks, serta spontanitas dan kualitas ucapan yang lekas berlalu begitu saja, bukan jenis ucapan yang dipikirkan secara dalam. Namun meskipun demikian, dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya tuturan-tuturan di internet terkhususnya media sosial sangatlah besar, dapat memicu adanya pertengkaran, perdebatan, hingga mengarah pada ranah kejahatan seperti ujaran kebencian dan ujaran penghinaan.

Adapun secara komprehensif, dalam pragmatik dikenal aspek-aspek pragmatik dapat terbagi menjadi tindak tutur, implikatur, deiksis, presuposisi, inferensi, entailment dan konteks. Pertama, tindak tutur, yakni tuturan yang memuat sebuah maksud dan dapat diidentifikasi dengan memperhatikan suatu konteks dari penuturnya. Tindak tutur dapat terbagi menjadi tiga jenis, yakni tindak tutur lokusi (*the act of saying something*), ilokusi (*the act of doing something*), dan perlokusi (*the act of affecting someone*). Tuturan “semua orang adalah lonte” dapat dikategorikan ke dalam tindak tutur perlokusi atau *the act of affecting someone*, dikarenakan tuturan tersebut dapat memberikan pengaruh kepada seseorang berupa reaksi emosional, baik bersikap menerima secara terbuka, terganggu atau tidak nyaman, kesal, hingga terang-terangan menunjukkan rasa marah.

Kedua, implikatur, yakni pernyataan secara tidak langsung atau makna tersirat. Implikatur dapat dipahami oleh kedua mitra tutur secara implisit apabila keduanya memiliki latar belakang pemahaman yang sama. Kata lonte memiliki implikatur konvensional sebagai seorang wanita yang umumnya tidak disenangi masyarakat karena melakukan pekerjaan yang menyimpang dari norma susila. Namun dalam perdebatan yang terjadi, pihak pro dan kontra sepertinya tidak memiliki pemahaman implikatur yang sama sehingga terjadi perdebatan. Ketiga, deiksis, yakni bentuk bahasa yang berkedudukan sebagai penunjuk fungsi atau acuan untuk merujuk sesuatu. Kata lonte masuk ke dalam kategori deiksis sosial yang penggunaannya berhubungan erat dengan masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia, kata “lonte” digunakan untuk merujuk seseorang yang menjual dirinya secara seksual demi mendapatkan uang, dengan kata lain seorang tunasusila.

Keempat, presuposisi atau praanggapan, yakni sebuah pandangan awal dan pemahaman yang sama antara penutur dan lawan tutur terkait suatu perihal yang sedang dikomunikasikan (Setiawati & Arista, 2018). Pada tuturan “semua orang adalah lonte”, antara pihak pro dan kontra tidak memiliki praanggapan yang sama, pihak pro beranggapan bahwa tuturan tersebut hanyalah masalah penyetaraan konteks “menjual” yang tidak perlu dipertentangkan, sedangkan pihak kontra beranggapan bahwa kata lonte adalah kata negatif yang tidak dapat dijadikan sebagai analogi. Presuposisi yang tidak sama tersebut tidak dapat ditentukan mana yang benar dan mana yang salah karena sifatnya yang subjektif, apabila hendak menilai secara objektif maka dapat meninjau dari aspek-aspek yang lain. Kelima, inferensi, yakni sebuah proses lanjutan setelah adanya presuposisi dalam diri penutur dan mitra tutur, dikarenakan pihak pro dan kontra tidak memiliki presuposisi yang sama maka tidak dapat dilakukan inferensi atau penyimpulan karena argumentasi keduanya yang saling bertentangan.

Keenam, entailment. Entailment dalam linguistik muncul dalam bahasa secara alami. Misalnya jika kalimat A mengandung kata atau frasa B sebagai inti kalimat maka kalimat A tersebut tidak bisa benar tanpa ada kebenaran dari kata atau frasa B. Pada tuturan “*Semua orang adalah lonte*”, frasa “semua orang” pada hakikatnya mengacu pada “semua profesi”, sehingga apabila hendak menyetarakan lonte dengan semua orang/profesi maka terlebih dahulu kata lonte harus memenuhi syarat untuk disebut sebagai profesi, sedangkan berdasarkan kebudayaan dan hukum kenegaraan masyarakat Indonesia, lonte tidak diakui secara hukum sebagai sebuah profesi, bahkan alih-alih diakui, orang yang melakukan kegiatan prostitusi justru terancam pidana berdasarkan pasal 298 KUHP. Menimbang kata lonte yang tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari sebuah profesi maka penyetaraan semua orang atau semua profesi dengan lonte tidak dapat dibenarkan secara entailment.

Ketujuh, aspek konteks yang menjadi tumpuan dari argumentasi pihak pro. Konteks sendiri merupakan konsep yang luas dengan melibatkan unsur fisik, linguistik, epistemis, hingga sosial. Meski benar terdapat kesamaan konteks “menjual” tetapi perbandingan agar profesi lonte dapat disetarakan dengan semua profesi tidaklah seimbang. Secara keseluruhan, pihak pro merasa tidak masalah karena adanya konteks “menjual badan” sedangkan pihak kontra menolak karena lonte menjual badan secara seksual, tidak hanya sekadar menjual badan biasa. Pihak pro menyanggah dengan menyatakan bahwa

definisi kamus, harfiah, atau leksikal tidaklah penting selama ada konteks, dan di sinilah letak kesalahannya, karena sejatinya pragmatik adalah ilmu yang melengkapi semantik, tidak meninggalkan apalagi menentang. Maka dari itu, apabila tuturan tersebut mendapat penolakan keras dari banyak pihak maka bukan berarti pihak tersebut tidak memahami atau cacat konteks sebagaimana klaim pihak pro. Tidak masalah apabila pihak pro nyaman dipanggil demikian, tetapi pihak kontra menolak adanya generalisasi karena berbagai pertimbangan, termasuk juga masih terdapatnya alternatif lain seperti kata pedagang, penjual, ataupun saudagar yang tidak mengandung konotasi negatif.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis konteks psikologis, maka kata “lonte” secara umum lebih banyak memberikan kesan tidak baik dan tidak nyaman baik saat ditulis maupun diucapkan. Kemungkinan psikologis yang dirasakan saat seseorang menuturkan kata “lonte” adalah perasaan kesal, marah, mengumpati, hingga merendahkan. Sangat jarang ditemukan ada seseorang yang membawa-bawa kata “lonte” saat ia sedang bahagia atau senang. Lalu, ada juga konteks sosial yang bersandar pada pemakaian di masyarakat. Pada kata “lonte” konteks sosialnya adalah seseorang yang menjual tubuh dalam aktivitas seksual untuk mendapat uang sehingga dianggap sebagai orang yang tidak baik. Dengan kata lain, apabila ada orang yang membawa-bawa kata lonte dalam tuturannya, maka secara sosial kemasyarakatan akan dianggap mengumpati, menghina, ataupun merendahkan seseorang yang menjadi mitra tuturnya.

Pernyataan di atas sejalan dengan adanya pihak atau penutur yang menanyakan mengapa tuturan “dasar seniman”, “dasar dokter”, dan sebagainya tidak membuat orang marah, tetapi mengapa tuturan “dasar lonte” mengundang kemarahan. Pada masalah tersebut, secara tersirat terdapat sebuah konotasi negatif dalam pandangan masyarakat yang mengisyaratkan bahwa hal tersebut bukanlah tuturan yang santun sehingga mengundang kemarahan atau perasaan terhina bagi yang membaca atau mendengarkan. Selain itu, terdapat juga konteks budaya. Pragmatik pada dasarnya juga mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks budaya suatu masyarakat. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang tidak melegalkan prostitusi, kata lonte banyak dikaitkan dengan prostitusi yang mana hal tersebut merupakan profesi yang tidak dilegalkan. Kata lonte juga selalu dihubungkan dengan wanita tunasusila, pelacur, penaja seks komersial, dan semacamnya. Oleh karenanya, penyeteraan semua profesi dengan kata lonte tidaklah tepat, dapat dilakukan alternatif lain seperti pedagang, saudagar, atau penjual.

Adapun jenis konteks yang menjadi perhatian lebih dalam pragmatik adalah konteks pengetahuan bersama, seperangkat latar belakang asumsi yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur. Namun, pengetahuan bersama yang umum diketahui dari kata lonte adalah pelacur, seksual, dan prostitusi, tetapi pihak pro tidak merasa demikian. Pihak pro merasa bahwa konteks yang terdapat di dalam tuturan “semua orang adalah lonte” adalah konteks menjual atau memperkerjakan badan untuk mendapat upah, terlepas dari ada atau tidaknya keterlibatan seksual di dalamnya. Ketidaksamaan latar belakang pengetahuan ini menjadikan konteks pengetahuan bersama tidak dapat tercapai sehingga apabila ada banyak pihak yang menolak untuk disetarakan dengan lonte maka pihak pro tidak dapat memaksakan pendapatnya.

Jadi, dapat ditarik simpulan bahwa apabila ditinjau berdasarkan perspektif pragmatik siber, meskipun terdapat konteks “sama-sama menjual badan” tetapi tetap terdapat konteks-konteks lain yang perlu dipertimbangkan, mulai dari konteks psikologis, sosial, budaya, hingga pengetahuan bersama. Selain itu, kajian pragmatik adalah kajian yang melengkapi semantik, bukan meninggalkan apalagi menentang, sehingga apabila ada pihak yang menolak bukan berarti pihak tersebut tidak memahami atau cacat konteks. Pada aspek-aspek pragmatik yang lain pun kata “lonte” secara khusus memberi pengaruh serta memiliki penanda dan makna tersirat konvensional yang nilainya kurang baik sehingga tidak tepat apabila digeneralisasikan dengan semua orang atau semua profesi. Penekanan konteks “menjual badan” juga tidak memiliki ketetapan yang pasti atau masih goyah karena konteks lonte sulit dilepaskan dari adanya konteks sosial dan budaya yang mengarah pada nilai-nilai yang kurang baik dan sulit diterima di mata masyarakat secara umum.

Tuturan “Semua Orang adalah Lonte” dalam Tinjauan Maksim Kesantunan

Selain aspek-aspek pragmatik yang telah dipaparkan pada subbahasan sebelumnya, terdapat juga prinsip-prinsip atau maksim-maksim dalam kajian pragmatik. Secara garis besar terdapat tiga jenis maksim, yakni maksim kerja sama, maksim relevansi, dan maksim kesantunan. Pada polemik perdebatan pemaknaan kata lonte maupun perdebatan pemaknaan tuturan “semua orang adalah lonte”, aspek yang paling dipermasalahkan dari ketiga maksim yang ada adalah aspek kesantunan. Pihak pro yang bersikeras tidak masalah selama ada konteks ditentang oleh pihak kontra yang merasa kata “lonte” memiliki konotasi negatif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai analogi. Pertentangan pada tuturan “semua orang adalah lonte” dimunculkan karena adanya perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan dari tuturan tersebut. Alasan ketidaknyamanan yang timbul dilatarbelakangi oleh nilai, rasa, dan makna negatif yang diberikan kata

lonte. Adanya citra negatif pada kata lonte tersebut menunjukkan bahwa baik kata lonte maupun tuturan semua orang adalah lonte adalah tuturan yang tidak santun sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman.

Selain itu, adanya penolakan oleh pihak kontra terhadap pendapat pihak pro karena merasa direndahkan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran maksim kesantunan di dalamnya. Perlu digarisbawahi sebelumnya bahwa tuturan langsung maupun tuturan di dunia siber pada dasarnya tidak bebas nilai, terdapat batasan-batasan yang meski kabur tetapi tetap ada dan bertujuan menjaga agar suatu tuturan memiliki nilai pada substansinya. Leech (2011) menyatakan bahwa terdapat dua prinsip kesantunan, yang pertama meminimalisir ungkapan perasaan yang tidak santun dan memaksimalkan ungkapan santun, dan yang kedua memilih kosakata yang tidak bersifat atau berpotensi merendahkan martabat atau harga diri seseorang. Sejalan dengan hal tersebut, Setiawati dan Arista (2018) secara lebih komprehensif mengklasifikasikan maksim kesantunan ke dalam empat jenis maksim berdasarkan pendapat para ahli; (1) maksim kesantunan Brown dan Gilman, (2) maksim kesantunan Lakoff, (3) maksim kesantunan Brown dan Levinson, dan (4) maksim kesantunan Leech. Namun, berdasarkan konteks kesantunan masyarakat Indonesia maka terdapat prinsip kesantunan Asim Gunarwan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal setempat. Di antara lima jenis maksim tersebut, yang relevan dalam tuturan di internet terkhususnya media sosial adalah maksim kesantunan Lakoff, Brown dan Levinson, Leech, serta Asim Gunarwan.

Pada maksim kesantunan Lakoff, suatu tindak tutur dapat dinyatakan memenuhi prinsip kesantunan jika tuturan tersebut memenuhi tiga kaidah. Kaidah pertama jangan memaksakan kehendak yakni penutur tidak boleh menekan dan menyakiti perasaan mitra tutur sehingga mitra tutur merasa terpaksa akan suatu hal. Berdasarkan prinsip kaidah pertama, tuturan “semua orang adalah lonte” melakukan pelanggaran maksim kesantunan karena terdapat mitra tutur yang merasa tersakiti dengan wacana yang menyamaratakan semua orang dengan lonte dikarenakan tuturan tersebut dianggap tidak menghargai usaha dan kerja keras mitra tutur dalam mengembangkan dirinya agar mendapat pekerjaan yang baik dan layak. Selanjutnya pada kaidah kedua yakni memberikan pilihan dimana penutur dalam menyampaikan tuturan harus memberi pilihan agar mitra tutur dapat memilih di antara alternatif yang diberikan, tidak memaksa pada satu pilihan saja. Semakin bebas dan semakin banyak alternatif yang dapat dipilih maka semakin santun tuturan yang disampaikan.

Adapun pada perdebatan tuturan “semua orang adalah lonte” didapati pelanggaran kaidah kedua karena pihak pro sebagai penutur tidak memberi pilihan lain kepada mitra tutur sehingga pihak kontra sebagai mitra tutur mempertanyakan mengapa tidak ada pilihan lain seperti penjual atau pedagang jika memang konteksnya adalah jualan. Lalu, pada kaidah ketiga yakni membuat rasa nyaman dan bersikap ramah dimana tuturan yang disampaikan diusahakan memiliki nada dan kosakata yang memberi kesan ramah juga tidak memaksa agar mitra tutur merasa nyaman. Pada kaidah ketiga, tuturan yang mendukung pernyataan “semua orang adalah lonte” mayoritas disampaikan dengan nada dan kosakata yang terkesan merendahkan dimana terdapat beberapa pihak pro selaku penutur yang menyatakan bahwa perdebatan yang terjadi disebabkan oleh kecacatan atau ketidakmampuan mitra tutur memahami konteks sehingga memberi kesan merendahkan bagi mitra tutur.

Selanjutnya pada maksim kesantunan Brown dan Levinson terdapat dua prinsip kesantunan yakni muka positif dan muka negatif. Apa yang dimaksud muka positif adalah keinginan untuk dihargai, sedangkan muka negatif adalah keinginan untuk tidak dilecehkan. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam batasan norma susila tidak mengherankan apabila pihak kontra selaku mitra tutur menolak untuk disetarakan dengan lonte karena merasa tidak dihargai dan dilecehkan, bahkan meski terdapat konteks di dalamnya, norma susila telah menetapkan bahwa lonte adalah profesi yang tuna susila. Maka dari itu, pihak pro selaku penutur seyogyanya tidak merendahkan pihak kontra selaku mitra tutur apabila mereka menolak adanya wacana semua orang adalah lonte. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan memberikan alternatif pilihan lain yang dapat diterima baik secara kesantunan lingual maupun sosial, misalnya kata penjual atau pedagang.

Selanjutnya, terdapat maksim kesantunan Leech yang terbagi lagi menjadi tujuh jenis maksim, yakni maksim kebijaksanaan, kedermwanaan, pujian, rendah hati, kesepakatan, simpati, dan pertimbangan. Dari ketujuh maksim tersebut, wacana yang menyetarakan atau menggeneralisasi semua orang dengan lonte melanggar maksim kebijaksanaan, rendah hati, pemufakatan, dan pertimbangan. Pada maksim kebijaksanaan terdapat prinsip bahwa peserta tutur (penutur dan mitra tutur) sepatutnya selalu mengurangi keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan orang lain, dengan kata lain menunjukkan sikap arif dan bijak. Sejalan dengan hal tersebut, maksim pemufakatan menekankan kecocokan dan kemufakatan dalam bertutur dengan tidak memenggal atau membantah langsung apa yang dinyatakan pihak lain. Namun, baik pihak pro selaku penutur maupun pihak kontra selaku mitra tutur keduanya cenderung bersikap

defensif terhadap pendapat pribadi sehingga sulit mendapat kesepakatan atau kemufakatan dalam berkomunikasi.

Adapun pada maksim rendah hati didapati prinsip untuk tidak bersikap sombong terhadap pendapat pribadi apalagi merendahkan orang lain. Pelanggaran dalam maksim ini cenderung dilakukan oleh pihak pro sebagai pihak penutur meski ada juga pihak kontra selaku lawan tutur yang membalas serupa. Kesombongan atau ketidakrendahhatian ditemukan dalam argumen yang menyatakan bahwa lawan tutur cacat dalam memahami konteks, penutur merasa benar dan mengungkapkan argumennya dengan membawa-bawa gelar akademik tinggi yang ia miliki, menyatakan lawan tutur salah kaprah karena berpegang pada moral bentukan semu dan penutur merasa senang dapat melucuti pemikiran lawan tutur yang dianggapnya sebagai *pseudo-logic*.

Selanjutnya pada maksim pertimbangan didapati prinsip untuk memberikan pertimbangan tertentu atas pendapat yang disampaikan orang lain, tidak bersikap *judgmental* atau menghakimi begitu saja sehingga lawan tutur merasa tidak senang. Pada maksim pertimbangan memiliki kasus yang sama dengan maksim kemufakatan yakni baik pihak pro selaku penutur maupun pihak kontra selaku lawan tutur keduanya bersikap defensif sehingga cenderung mengambil sikap menghakimi terhadap pendapat pihak yang berlawanan. Maka dari itu, sulit untuk mencapai kemufakatan dalam perdebatan di ruang terbuka (media sosial), kecuali terdapat kajian secara ilmiah dan akademis yang menengahi keduanya.

Adapun pada prinsip kesantunan Asim Gunarwan yang mengacu pada budaya timur, terdapat empat prinsip kesantunan, yakni *kurmat*, *andhap asor*, *empan papan*, dan *tepa slira* (Gunarwan, 2004). Pada prinsip pertama, *kurmat*, bermakna menghormati orang lain. Apabila suatu tuturan membuat orang lain merasa direndahkan atau tidak dihormati, maka tuturan tersebut tidak dapat dinyatakan santun. Adapun pada konflik perdebatan semua orang adalah lonte terdapat banyak pihak yang merasa direndahkan sehingga tuturan tersebut melanggar prinsip kesantunan *kurmat*. Selanjutnya, pada prinsip kedua, *andhap asor*, bermakna rendah hati, sama halnya dengan prinsip kesantunan Leech, sebisa mungkin penutur harus menghindari untuk memuji diri sendiri atau berlaku sombong. Adanya pihak-piha yang merasa dirinya paling benar dan tidak ingin dibantah, bahkan mengatakan orang lain cacat konteks menjadikan prinsip *andhap asor* juga terlanggar.

Pada prinsip ketiga, *empan papan*, bermakna harus bisa menempatkan diri berdasarkan kondisi lingkungan sekitar terkhususnya lingkungan tempat tinggal. Berbeda dengan budaya barat, budaya timur, termasuk Indonesia tidak dapat menjustifikasi lonte sebagai profesi yang diterima di masyarakat. Alih-alih diterima, lonte dianggap sebagai kata kasar yang mengandung makna negatif dan bahkan dianggap umpatan yang tidak pantas dan sangat merendahkan. Selanjutnya pada prinsip keempat, *tepa slira* atau tenggang rasa, bermakna usaha untuk menghargai dan menjaga perasaan orang lain, tidak mengganggu atau menyinggung. Sebagaimana paparan-paparan sebelumnya, tidak hanya terganggu, terdapat pihak yang merasa tersinggung, kesal, bahkan marah disetarakan dengan lonte yang dianggap sebagai kata yang negatif, sehingga rasa tenggang rasa pada polemik perdebatan semua orang adalah lonte telah dilanggar.

Adapun terlepas dari prinsip-prinsip dan kaidah kesantunan yang dikemukakan oleh ahli, kesantunan juga dapat dinyatakan sebagai adat atau tata cara yang berlaku dan dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sosial yang telah disepakati. Di masyarakat, sifat kesantunan bersifat relatif dan menjadi properti yang diasosiasikan dengan tuturan dengan mempertimbangkan pendapat dari pihak mitra tutur bahwa penutur tidak melampaui hak dan kewajibannya (Setiawati & Arista, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, maka mempertimbangkan pemaknaan kata lonte dalam perspektif masyarakat Indonesia yang dihubungkan dengan pelacur, wanita tunasusila, jalang, perempuan tidak baik-baik atau nakal, dan sebagainya, maka generalisasi semua orang dengan lonte telah melanggar norma kesantunan yang ditetapkan di masyarakat. Indonesia adalah negara yang tidak melegalkan prostitusi, baik secara kemasyarakatan, kebahasaan, maupun kenegaraan atau hukum, tidak menerima lonte sebagai sebuah profesi, sehingga selama hal-hal di atas tidak berubah maka lonte adalah kata yang tidak santun dan bahkan satuan lingual lonte sendiri dianggap sebagai yang paling kasar di antara satuan-satuan lingual lain yang merujuk pada wanita tunasusila.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik simpulan bahwa secara semantik tuturan yang menyamaratakan semua orang dengan lonte tidak dapat dibenarkan. Berlandaskan tujuh jenis makna dalam kajian semantik, kata lonte, pelacur, maupun prostitusi tidak memiliki nilai positif. Baik makna secara asli (denotatif, leksikal, dan referen) maupun makna tidak langsung (konotatif dan asosiatif), kata “lonte” berkaitan dengan hal-hal yang negatif, seperti pelacur, buruk laku, tunasusila, jalang, sundal, dsb. Adapun berdasarkan sebelas relasi makna dalam semantik, kata lonte bersinonim, berhiponim (subordinat), dan

berhipernim (superordinat) dengan kata yang memiliki medan makna negatif. Secara relasi makna asosiatif, afektif, maupun etimologis kata lonte juga menimbulkan nilai dan rasa negatif serta tidak nyaman dalam makna katanya, bahkan secara etimologis kata lonte dianggap paling kasar dari semua kata lain yang merujuk pada kata pelacur. Adapun berdasarkan perspektif pragmatik siber, meski terdapat konteks “sama-sama menjual badan” tetapi terdapat konteks-konteks lain yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, kajian pragmatik adalah kajian yang melengkapi semantik, bukan meninggalkan apalagi menentang, sehingga apabila penolakan bukan berarti pihak tersebut tidak memahami atau cacat konteks.

Pada aspek-aspek pragmatik yang lain pun kata “lonte” secara khusus memberi pengaruh serta memiliki penanda dan makna tersirat konvensional yang nilainya kurang baik sehingga tidak tepat apabila digeneralisasikan dengan semua orang atau semua profesi. Selain itu, kajian pragmatik tidak dapat dilepaskan dari adanya maksim-maksim, termasuk salah satunya maksim kesantunan. Polemik yang terjadi terbukti melanggar maksim kesantunan Lakoff, Brown dan Levinson, maksim kesantunan Leech, serta prinsip kesantunan Asim Gunarwan yang mengacu pada kesantunan masyarakat Indonesia. Adapun kesantunan juga dapat dinyatakan sebagai adat atau tata cara yang berlaku dan dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sosial yang telah disepakati. Indonesia adalah negara yang tidak melegalkan prostitusi, baik secara kemasyarakatan, kebahasaan, maupun kenegaraan atau hukum, tidak menerima lonte sebagai sebuah profesi, sehingga selama hal-hal di atas tidak berubah maka lonte adalah kata yang tidak santun dan bahkan satuan lingual lonte dianggap sebagai yang paling kasar di antara satuan lingual lain yang merujuk pada wanita tunasusila.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdar. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka AQ.
- Chaer, A., & Muliastuti, L. (2014). *Semantik Bahasa Indonesia: Makna dan Semantik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gunarwan, A. (2004). Pragmatik, Budaya dan Pengajaran Bahasa. *Seminar Nasional Semantik III*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Routledge.
- Leech, G. (2011). *Prinsip-prinsip Pragmatik (Terjemahan M. D. D. Oka)*. Jakarta: UI Press.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahsun. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajawali.
- Maulida, U. (2022). Pergeseran Makna Kata pada Komunikasi Generasi Alpha sebagai Kontestasi Identitas. *KODE: Jurnal Bahasa*, 11(1), pp. 38–49. DOI: <https://doi.org/10.24114/kjb.v11i1.33492>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), pp. 145–151. DOI: <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru (Penerjemah Universitas Indonesia, Terjemahan dari Sage Publications)*. Jakarta: UI Press.
- Ningtyas, A. C., Difanti, N., dan Ginanjar, B. (2022). Pergeseran Makna pada Istilah Penunjuk Fauna di Media Sosial Twitter: Kajian Semantik. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 12(1), pp. 55–65. DOI: <https://doi.org/10.23969/literasi.v12i1.4801>
- Pateda, M. (2010). *Semantik Leksikal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahardi, R. K. (2019). Mendeskripsi Peran Konteks Pragmatik: Menuju Perspektif Cyberpragmatics. *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 3(2), pp. 164–178. DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/transformatika.v3i2.2333>
- Rahardi, R. K. (2020). Konteks dalam Perspektif Cyberpragmatics. *Journal Masyarakat Linguistik Indonesia*, 38(2), pp. 151–163. DOI: <https://doi.org/10.26499/li.v38i2.132>
- Rahardi, R. K. (2022). Memerikan Fungsi Konteks Situasi Dalam Perspektif Pragmatik Siber. *Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia*, 40(2), pp. 197–211. DOI: <https://doi.org/10.26499/li.v40i2.286>
- Rahma et al. (2018). Pergeseran Makna: Analisis Peyorasi dan Ameliorasi dalam Konteks Kalimat. *Journal Hasta Wiyata*, 1(2), pp. 64–74. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2018.001.02.01>
- Setiawati, E., & Arista, H. D. (2018). *Piranti Pemahaman Komunikasi dalam Wacana Interaksional (Kajian Pragmatik)*. Malang: UB Press.
- Simarmata, M. Y. (2016). Analisis Unsur Leksikal dalam Wacana Pada Surat Kabar Tribun Pontianak Rubrik ‘Borneo Sport’ (Edisi, 16 Mei-21 Mei 2014). *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 3(2), pp. 211–224. DOI: <https://doi.org/10.31571/bahasa.v3i2.167>
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Stalnaker, R. C. (1972). *Pragmatics*. Dordrecht: Reidel Publishing Company.

- Tarigan, H. (2015). *Pengajaran Semantik*. Bandung: CV Angkasa.
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2010). *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Wiyanti, E., Atmapratiwi, H., & Pangesti, I. (2022). Pergeseran Makna Kosakata Bahasa Indonesia pada Pengguna Twitter. *Sinatra: Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra*, 1(-), pp. 121–132. DOI: —. Retrieved from <http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/sinatra/article/view/6076>
- Yus, F. (2011). *Cyberpragmatics, Internet-mediated Communication in Context*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Zed, Mestika. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan (cetakan kelima)*. Jakarta: Yayasan Obor.